



## PARTISIPASI MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KOMUNITAS PERDESAAN

Irfan Rahmanu

Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

e-mail: [irfanrahmanu4698@gmail.com](mailto:irfanrahmanu4698@gmail.com)

**Abstract:** *Empowerment is the pathway to participation, and participation determines the social and economic impact of community development programs. In general, the purpose of this study was to identify the relationship between community involvement and stakeholders in the implementation of the Geothermal Microfinance Institution's CSR program and its impact on the socio-economic conditions of the community. The microfinance program in Kabandungan District works closely with LKMS Kartin. The subjects of this research are the people of Cihamerang Village which includes the local government and local communities, as well as company employees. The method used in this research consists of quantitative and qualitative research. A total of 45 respondents representing the Cihamerang Village community and nine informants were interviewed. The results of this study indicate that each stakeholder has a different type and level of involvement. The higher the involvement of microfinance board members in each stage of program implementation, the greater the social and economic impact.*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility (CSR), Community Development, Community and Stakeholder Participation Levels, Socio-Economic Impacts.*

**Abstrak:** Pemberdayaan adalah jalan menuju partisipasi, dan partisipasi menentukan dampak sosial dan ekonomi dari program pengembangan masyarakat. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program CSR Lembaga Keuangan Mikro Panas Bumi dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Program keuangan mikro di Kabupaten Kabandungan bekerja sama dengan LKMS Kartin. Subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Cihamerang yang meliputi pemerintah daerah dan masyarakat setempat, serta karyawan perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sebanyak 45 responden yang mewakili masyarakat Desa Cihamerang dan sembilan informan diwawancarai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki jenis dan tingkat keterlibatan yang berbeda. Semakin tinggi keterlibatan anggota dewan keuangan mikro dalam setiap tahapan pelaksanaan program, semakin besar pula dampak sosial dan ekonominya..

**Keywords :** Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Pengembangan Masyarakat, Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan, Dampak Sosial Ekonomi.

## PENDAHULUAN

Perusahaan sebagai suatu sistem tidak dapat berdiri sendiri dalam hal keberlanjutan dan keseimbangan. Keberadaan perusahaan dalam masyarakat berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Kegiatan perusahaan bersinggungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan dan mempertimbangkan aspek sosial budaya. Salah satunya adalah peningkatan hubungan yang saling menguntungkan dengan faktor lain, baik di berbagai tingkatan pemerintahan, swasta maupun sosial. Hubungan baik tersebut dapat muncul dari interaksi antar pemangku kepentingan terkait pelaksanaan program CSR (Corporate Social Responsibility). (Rosyida and Tonny Nasdian, 2011).

Berbasis di Gunung Salak, The Geothermal Company merupakan perusahaan yang memanfaatkan sumber energi panas bumi terbesar di dunia. Energi panas bumi merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan digunakan untuk menghasilkan listrik dengan memanfaatkan uap alami bumi. Menunjukkan profesionalisme dan tanggung jawab sosial, program CSR (*Corporate Social Responsibility*) mencakup tiga bidang kritis, yaitu kebutuhan tinggi, pendidikan, dengan fokus pelaksanaannya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas dan investasi masyarakat. Penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan

Penting untuk melihat berbagai implementasi program pengembangan masyarakat dalam hal partisipasi pemangku kepentingan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat pedesaan. Pada hakekatnya keberhasilan program CSR salah satunya terkait dengan bagaimana program CSR dapat memberikan dampak yang signifikan dan pada akhirnya berdampak positif bagi kehidupan masyarakat melalui bisnis. Oleh karena itu, dalam penjelasan di atas, muncul pertanyaan bagaimana partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program CSR yang berdampak sosial ekonomi bagi masyarakat pedesaan. (Rosyida and Tonny Nasdian, 2011).

## **METODE**

Pendekatan cross-sectional deskriptif dan analitis digunakan sebagai metode penelitian. Tujuan dari model ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh berbagai variabel tujuan tanggung jawab sosial perusahaan, urusan sosial perusahaan dan program hubungan perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan cross-sectional digunakan, karena data yang dikumpulkan pada kedua variabel dikumpulkan dan diukur secara bersamaan selama penelitian. Berdasarkan karakteristik masalah yang dihadapi, penelitian ini merupakan penelitian explanatory, yaitu jenis penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan antar variabel. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analitis. Prosedur ini dilakukan dengan membuat deskripsi tentang fenomena yang ada kemudian melakukan analisis untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dimana terdapat hubungan antar variabel.

## **PEMBAHASAN**

### **Pemberdayaan Masyarakat Dalam Konsep CSR**

(Sumardjo et al., 2014) CSR merupakan suatu konsep gagasan yang menuntut perusahaan untuk memperhatikan tidak hanya keadaan hasil perusahaan tetapi juga kesejahteraan masyarakat sekitar. Konsep tanggung jawab perusahaan didasarkan pada tiga keseimbangan profit, people and planet.

Empat sistem umumnya telah digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu

1. Partisipasi dalam program pengembangan masyarakat
2. Membiayai tindakan sesuai dengan kerangka hukum
3. melibatkan masyarakat dalam usaha dan
4. Menanggapi Tekanan Pemangku Kepentingan.

Perusahaan yang berhasil menerapkan CSR menggunakan tahapan implementasi CSR sebagai berikut:

- a) Fase desain: Fase ini terdiri dari tiga fase utama yaitu
- b) Ciptakan kesadaran
- c) Evaluasi CSR
- d) Struktur manual CSR.

Peningkatan kesadaran merupakan langkah awal dalam menyadarkan perusahaan akan pentingnya CSR dan keterlibatan manajemen. Ini dapat dilakukan dalam seminar, lokakarya, dan lainnya. Penilaian CSR merupakan upaya untuk memetakan keadaan perusahaan dan mengidentifikasi isu-isu prioritas dan tindakan yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang mendorong pelaksanaan CSR yang efektif. Pada tahap konstruksi, CSR manual dilakukan dengan bantuan benchmarking, menelusuri referensi atau mencari bantuan dari ahli independen di luar perusahaan. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kejelasan dan konsistensi pola pikir dan praktik seluruh bagian organisasi untuk mencapai implementasi program yang terintegrasi, efektif dan efisien.

Fase komisioning: Pada tahap ini beberapa hal harus diperhatikan, seperti pengorganisasian sumber daya, penyiapan pengerahan orang tergantung pada sifat tugas, pengelolaan, pengendalian, pelaksanaan, bekerja sesuai rencana dan evaluasi untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan.

Tahap pemantauan dan evaluasi: Langkah ini harus dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur efektivitas pelaksanaan CSR untuk membantu perusahaan memetakan kondisi dan situasi serta kegiatan perusahaan dalam melaksanakan CSR sehingga dapat Untuk setiap tingkatan pelaporan, bertujuan untuk membangun sistem informasi, diperlukan pelaporan baik untuk proses pengambilan keputusan maupun untuk kebutuhan mempublikasikan materi dan informasi penting tentang perusahaan.

Fase pelaporan: Untuk membangun sistem informasi, pelaporan harus dilakukan baik untuk proses pengambilan keputusan maupun untuk publikasi materi dan informasi yang relevan tentang perusahaan.

Gagasan mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan hal mendasar bagi sebagian besar perusahaan, meskipun gagasan ini juga mewakili isi membangun dan mengelola perusahaan dan menjadi sangat penting bagi manajemen strategis. Pengembangan masyarakat sebagai salah satu implementasi, yang hanya berbentuk charity, filantropi atau dimensi lain dari tanggung jawab sosial, karena pelaksanaan pengembangan masyarakat memiliki prinsip kerjasama, partisipasi,

produktivitas, kesinambungan kepentingan bersama perusahaan dan masyarakat, dan bisa mempererat rasa kebersamaan. Tanggung jawab sosial dapat diwujudkan dengan mengembangkan potensi kedermawanan perusahaan. Kemurahan hati perusahaan sebenarnya adalah kemurahan hati sosial, terkait dengan kesadaran dan komitmen perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya.(Rosyida and Tonny Nasdian, 2011).

### **Konsep Partisipasi**

Pemberdayaan merupakan cara atau sarana partisipasi. Pemberdayaan masyarakat tentunya diperlukan sebelum tahap ini dapat dicapai. Pemberdayaan memiliki dua unsur utama, kemandirian dan partisipasi.(Rosyida and Tonny Nasdian, 2011).

(Pranoto and Yusuf, 2016) Beberapa fase partisipasi, sebagai berikut:

1. Tahap menentukan, diwujudkan dalam partisipasi kooperatif dalam rapat. Fase keputusan yang dimaksud di sini adalah perencanaan dan implementasi program.
2. Fase implementasi, fase pengembangan yang paling penting, karena inti dari pengembangan adalah implementasi. Bentuk partisipasi konkrit dalam fase ini terbagi menjadi tiga, yaitu partisipasi berupa sumbangan ide, sumbangan natura dan kegiatan sebagai anggota proyek.
3. Tahap evaluasi dianggap penting karena keterlibatan masyarakat dalam tahap ini merupakan umpan balik yang dapat membantu perbaikan pelaksanaan proyek nantinya.
4. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, mengingat status masyarakat sebagai tujuan pembangunan berarti semakin besar manfaat proyek yang dirasakan, semakin sukses proyek tersebut dalam mencapai tujuan.

Semua tingkat partisipasi yang disebutkan di atas merupakan satu kesatuan inisiatif pembangunan pedesaan, meskipun satu tingkat partisipasi dapat dianggap tidak biasa. Partisipasi Masyarakat menggambarkan bagaimana terjadi pembagian kekuasaan yang adil antara penyelenggara kegiatan dan kelompok penerima kegiatan. Keterlibatan

masyarakat dilapisi oleh tingkat kekuasaan dan tanggung jawab yang terlihat dalam proses pengambilan keputusan.

(Nabilla and Hamid, 2021) Desa merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam di Indonesia dan itulah salah satu alasan mengapa perusahaan bermukim di pedesaan. Selain sumber daya alam yang kaya, bentang alam ini juga memiliki sumber daya manusia yang berpotensi memperkuat desa melalui komunitas. Menurut Kementerian Dalam Negeri, jumlah desa di Indonesia adalah 65.189. Namun demikian, masih banyak keterbelakangan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pedesaan tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di pedesaan memerlukan kesadaran untuk mendelegasikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar dalam bentuk kemampuan dan keberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan satu dan lain cara dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat, yang terkait dengan kebebasan rakyat untuk memilih dan beragen. Pemberdayaan masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan hak-hak dasar secara umum, mengakses layanan kesehatan dan pendidikan masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung produktivitas masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan pengambilan keputusan publik.(Nabilla and Hamid, 2021).

Masyarakat merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan dan fokus dalam penguatan kota. Dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya pemberdayaan masyarakat, penting bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam program CSR dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Karena segala bentuk tanggung jawab sosial perusahaan merupakan hal yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan potensinya (Nabilla and Hamid, 2021). Masyarakat lokal adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memberdayakan diri sendiri. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa saat ini meningkatkan fokus pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ini, sehingga sumber daya dan kemampuan masyarakat semakin kuat. (Nabilla and Hamid, 2021).

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terdapat empat prinsip keberhasilan program pemberdayaan yaitu prinsip pemerataan, partisipasi, kemandirian atau kemandirian dan keberlanjutan. Partisipasi masyarakat merupakan prinsip penting bagi penyelenggara Program Pemberdayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan agar pelaksanaan program berhasil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun fenomena yang terjadi adalah pelaku ekonomi masih menganggap masyarakat sebagai objek dan bukan subjek ketika melaksanakan program CSR, sehingga masih banyak implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau tanggung jawab sosial yang belum tepat sasaran dan hanya terkesan bekerja dikerahkan. citra yang baik terlepas dari nama perusahaan. (Nabilla and Hamid, 2021).

### **Dampak Program CSR**

Jurnalnya A Review of the Theories of Corporate Social Responsibility membuat kajian khusus tentang bagaimana menelaah secara detail jejak dan perkembangan teori Corporate Social Responsibility: Jalur perkembangannya dan jalan ke depan". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan jalur pengembangan konseptual dari teori Corporate Social Responsibility (CSR) dan mempertimbangkan dampaknya terhadap pembangunan. Dalam retrospeksi, tren pengembangan adalah rasionalisasi bertahap. dari konsep , dimana fokusnya terutama pada komitmen yang lebih kuat terhadap tujuan keuangan perusahaan.(Rosyida and Tonny Nasdian, 2011).

(Sumardjo et al., 2014)Dokumen Rencana Strategis (Renstra) menjelaskan bahwa ada tujuh strategi implementasi:

- Memperkuat sinergi kemitraan dengan pihak terkait
- Memperkuat sistem manajemen dengan memperkuat SOP dan implementasinya
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penerapan standar kualifikasi
- Implementasi Comdev didasarkan pada standar internasional (MDGs, ISO 26000 & GRI)
- Perkuat komunitas bersama-sama dengan bantuan

- Pengembangan rilis Comdev dengan sistem dokumentasi terintegrasi
- Pengembangan struktur organisasi comdev yang menguntungkan

### **Coprotare Social Responsibility Penting Bagi Perusahaan**

Mengapa perusahaan harus memperkenalkan tanggung jawab sosial atau biasa disebut CSR (Corporate Social Responsibility)? Dalam pengambilan keputusan tidak jarang menemui hambatan, interupsi dan hambatan untuk mencapai kondisi yang optimal akibat munculnya konflik kepentingan dengan lingkungan. Benturan kepentingan ini dapat berbentuk sebagai berikut: Situasi yang dianggap dominan atau bahkan "mencekik", hak untuk menggunakan sumber daya lingkungan masyarakat, dampak sosial ekonomi dari operasi perusahaan terhadap lingkungan, dampak operasi perusahaan terhadap pemangku kepentingan, dll. konsekuensi dari operasi. dari perusahaan. Pada kenyataannya, perusahaan dapat berproduksi atau beroperasi secara optimal dan berkelanjutan jika didukung oleh iklim yang kondusif untuk operasi produksi yang berkelanjutan. Iklim yang positif mungkin berhubungan dengan faktor internal, tetapi faktor eksternal tidak kalah pentingnya. Dalam uraian ini lebih ditekankan pada faktor eksternal perusahaan yang berkaitan dengan suasana kondusif perusahaan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dapat berupa upaya untuk mendapatkan izin usaha dari masyarakat setempat dan menjadi bagian dari manajemen risiko perusahaan untuk mengurangi atau menghindari konflik sosial. Selain itu, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan harus memiliki kesempatan untuk menampilkan citra perusahaan yang khas, baik, dan beretika kepada publik. dan dapat menciptakan loyalitas pelanggan.

Khususnya dalam perkembangan usaha menengah dan besar telah terjadi perpindahan kepemilikan dari kepemilikan swasta menjadi kepemilikan publik. Pengaruh Pengalihan Harta dari Milik Swasta ke Milik Umum. Akibat peralihan kepemilikan perusahaan dari kepemilikan privat ke kepemilikan publik dapat diamati.

Secara tidak langsung, hal ini berarti bahwa perusahaan bukan lagi sekedar lembaga ekonomi tetapi telah menjadi lembaga sosial dan tugas dunia usaha tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab secara sosial). (Sumardjo et al., 2014).

## **Dasar Hukum Implementasi CSR dan Isu Seputas Implementasi CSR**

Peraturan Nasional Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tertuang dalam UU 40 Tahun 2007 dan PP 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang disahkan DPR pada 20 Juli 2007, menandai babak baru pengaturan CSR di negeri ini. Tanggung Jawab Sosial merupakan standar baru perusahaan yang harus dipenuhi sebagai standar ISO (ISO 26000 adalah Tanggung Jawab Sosial) sehingga tuntutan dunia usaha semakin jelas tentang pentingnya program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan jika perusahaan menginginkan keberlanjutan. (Rosyida and Tonny Nasdian, 2011).

Pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, batasan TJSL adalah: "Komitmen perusahaan untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya."

Tumbuhnya kesadaran dan edukasi masyarakat tentang keberadaan perusahaan di lingkungannya mengakibatkan perusahaan mampu mengembangkan Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini karena operasi perusahaan tidak hanya menghasilkan laba bagi perusahaan yang bersangkutan, tetapi juga sering menimbulkan dampak sosial ekonomi bahkan biaya sosial bagi kehidupan mereka yang terlibat.

Apa itu Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)? Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan indikasi tanggung jawab organisasi (perusahaan) atas dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab ini diwujudkan dalam perilaku transparan dan beretika yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan sesuai dengan hukum yang berlaku dan standar perilaku internasional; dan terintegrasi di seluruh organisasi". (Sumardjo et al., 2014).

**CSR adalah jenis usaha serius oleh unit bisnis:** meminimalkan dampak negatif dari operasi perusahaan dan memaksimalkan dampak positif pada semua yang terlibat di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan implikasi operasional dari komitmen pertanggungjawaban perusahaan atas

ekses yang diakibatkan oleh kegiatan operasional ditinjau dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan mencapai keseimbangan dengan menghasilkan manfaat komersial dan lingkungan dari dampak tersebut.

Kewajiban perusahaan/firma untuk memperhitungkan dampak dapat mencakup aspek-aspek berikut: Ekonomi/Pasar, Masyarakat dan Lingkungan (Triple Bottom Line), yaitu Profit, People (Komunitas), Planet (Lingkungan); menjadi “good neighbor” dengan memberikan manfaat (a good cause) kepada masyarakat dan menjadi good corporate citizen dengan mengedepankan aspek keberlanjutan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memiliki potensi untuk mengungkapkan kontribusi total dunia usaha terhadap keberlanjutan ketika mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari operasinya.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TJSL tertuang dalam peraturan sebagai berikut:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Saham Bersama (PT). PES yang berbisnis dan/atau berkepentingan dengan sumber daya alam harus bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.
2. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Hukum Negara (BUMN). Dijelaskan lebih detail melalui Keputusan Menteri BUMN No. 4 Tahun 2007 - Pembiayaan Badan Usaha Milik Negara disebut juga dengan PKBL yaitu sebesar 2% dari laba bersih
3. UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal: Setiap penanam modal berkewajiban memikul tanggung jawab sosial.

Ketentuan hukum tentang TJSL tertuang dalam ketentuan sebagai berikut:

1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Jaminan Sosial: Unit usaha memiliki peran dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan
2. PP 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.

UU No. 40 Tahun 2007 mengacu pada perlunya terus membangun hubungan bisnis yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, standar, dan budaya masyarakat setempat.

## **UU 40 TAHUN 2007 PASAL 74 PERUSAHAAN TERBATAS**

1. Pelaku usaha yang melakukan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau kegiatan yang terkait dengannya wajib
2. Tanggung jawab sosial dan ekologis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan kewajiban yang dianggarkan atas beban perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan kewajiban.
3. Perseroan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tambahan diatur dengan peraturan pemerintah.

Perusahaan yang bidang usahanya merupakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang dimaksud yaitu "perusahaan yang bergerak dalam usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah perusahaan yang tidak mengelola atau mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya mempengaruhi kegiatan usaha sumber daya alam. Selanjutnya dikatakan: Perusahaan yang tidak mematuhi peraturan ini "kecuali sanksi diwajibkan oleh undang-undang" akan dikenakan semua jenis sanksi yang diatur oleh undang-undang dan peraturan yang relevan.

(Sumardjo et al., 2014) Sebagai pengelola CSR, setidaknya Anda harus memahami dimensi atau aspek CSR, antara lain:

1. Dimensi tanggung jawab perusahaan terkait kebijakan dan etika bisnis serta budaya perusahaan dan penyelesaian konflik
2. Dimensi yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai/pegawai, misalnya kesempatan yang sama, hubungan pegawai, standar kerja, evaluasi kinerja, kompensasi, fleksibilitas waktu kerja, pertumbuhan dan perkembangan kualitas pegawai, penyelesaian pegawai dan pemberdayaan pegawai.
3. Dimensi aplikasi pasar meliputi perlindungan konsumen, kepuasan pelanggan, pembayaran yang wajar dan pelayanan tepat waktu
4. Dimensi tanggung jawab fiskal, pengawasan dan pengendalian
5. Dimensi hubungan internasional seperti hak asasi manusia, tenaga kerja dan standar lingkungan, pembelian dan kontrak, dan kewajiban internasional

6. Dimensi tanggung jawab, meliputi audit tanggung jawab sosial, pemantauan dan pelaporan kepada pemangku kepentingan
7. Dimensi lingkungan, yaitu H. Pengelolaan emisi/limbah, peraturan lingkungan, pernyataan kebijakan lingkungan, pengelolaan dan komunikasi masalah lingkungan, dan struktur sosial dan sumber daya manusia
8. Dimensi pengembangan masyarakat yaitu pemetaan partisipatif, pengembangan masyarakat, pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha ekonomi daerah, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial budaya, partisipasi masyarakat, pendampingan dan pelayanan masyarakat, seni budaya, ekonomi dan infrastruktur transportasi, dan penguatan . upaya meningkatkan daya saing masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi tren global serta meningkatnya kepedulian masyarakat dunia terhadap produk yang ramah lingkungan dan memasukkan norma sosial dan hak asasi manusia dalam produksi. Bank-bank Eropa hanya menerapkan kebijakan pemberian pinjaman kepada perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan baik. Misalnya, bank-bank Eropa hanya memberi pinjaman kepada perusahaan perkebunan Asia jika perusahaan tersebut memiliki jaminan, yaitu. jika perkebunan tidak dibuka dengan membakar hutan.(Sumardjo et al., 2014).

Kecenderungan global lain dalam penerapan CSR di bidang pasar modal adalah pengenalan indeks yang berisi kelas saham perusahaan yang telah mempraktekkan tanggung jawab sosial. Sebagai contoh, New York Stock Exchange memiliki Dow Jones Sustainability Index (DJSI) untuk saham-saham perusahaan yang diklasifikasikan sebagai sekuritas tanggung jawab perusahaan, dan salah satu kriterianya adalah praktik CSR. Juga London Stock Exchange yang memiliki Socially Responsible Investment (SRI). Otoritas bursa saham Asia seperti bursa saham Hangseng dan Singapura kini mengikuti inisiatif ini. Ini berfungsi untuk mematuhi peraturan, undang-undang dan peraturan yang relevan dan pada saat yang sama memposisikan perusahaan di masyarakat untuk citra positif sebagai bagian dari strategi perusahaan.

Dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara implisit dinyatakan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 15 (2) Setiap penanam modal wajib memenuhi kewajiban korporasi, (4) menghormati tradisi budaya masyarakat tempat usaha penanaman modal itu berada.

Pasal 16 (4) Setiap penanam modal bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan

Pasal 17 Setiap penanam modal yang menggunakan sumber daya alam tak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan kawasan sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 Sanksi administratif dikenakan kepada unit usaha atau perusahaan perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban tanggung jawab sosialnya.

Beberapa kesalahan umum yang sering diamati saat menerapkan CSR di berbagai perusahaan masih banyak terjadi. Beberapa kesalahan umum yang perlu dibenahi atau diperbaiki adalah (Sumardjo et al., 2014).

1. Adanya kerancuan antara CSR, Community Development (CD Community Development) dan PKBL BUMN;
2. CSR biasanya identik dengan filantropi;
3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan hanya mencakup aspek sosial;
4. Organisasi CSR hanya merupakan entitas tertanam dan CSR hanya untuk perusahaan besar dan memisahkan CSR dari bisnis inti perusahaan;
5. CSR untuk diri sendiri, bukan untuk seluruh rantai pasokan;
6. Setelah produk sampai ke konsumen, tidak ada lagi CSR;
7. CSR hanyalah biaya tambahan;
8. Tanggung jawab perusahaan didanai setelah keuntungan;
9. CSR adalah upaya memoles citra perusahaan sehingga perusahaan memandang CSR sepenuhnya bersifat sukarela;
10. Praktekkan CSR secara eksternal

Terkait kerancuan antara Corporate Social Responsibility dan Community Development (CD). CD merupakan kegiatan pengembangan masyarakat perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat dibandingkan dengan kondisi

sebelumnya untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang lebih baik. Pengembangan masyarakat merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR). Meski terkait dengan kerancuan antara CSR dan PKBL, terutama terkait pendanaan. CSR adalah biaya operasional perusahaan, baik perusahaan tersebut menguntungkan maupun belum menguntungkan, sedangkan PKBL dibiayai dari persentase tertentu dari keuntungan perusahaan. Jika perusahaan belum mengembangkan PKBL, mungkin karena perusahaan belum mendapatkan keuntungan dari operasinya. PKBL ini berlaku khusus untuk perusahaan kategori BUMN.

Jadi, tujuan Perjanjian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PP No. 47 Tahun 2012) pada intinya adalah:

1. Sensitisasi perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
2. Menanggapi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
3. Memperkuat perjanjian tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang sejalan dengan operasi perusahaan.

Secara umum, setidaknya ada enam perbedaan antara CSR dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) yang berlaku pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu:

1. Dasar hukum
2. Sasaran/Tujuan,
3. Subjek regulasi,
4. sifat peraturan
5. Area tanggung jawab dan
6. Penganggaran.
7. Tata Kelola Organisasi CSR

Menurut standar (Sumardjo et al., 2014) setidaknya ada tujuh aspek pengelolaan CSR dalam organisasi bisnis yang harus diperhatikan, yaitu:

1. pengelolaan organisasi
2. Tentang hak asasi manusia

3. Kepedulian terhadap aspek lingkungan
4. Praktek Operasi Perusahaan yang Adil (Fear),
5. Tentang urusan konsumen,
6. Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan Masyarakat
7. Kaitannya dengan pekerjaan.

Pada prinsipnya, prinsip-prinsip berikut harus diperhatikan dalam sistem yang direncanakan dan diterapkan organisasi untuk mencapai tujuannya (tata kelola organisasi) Akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, menghormati kepentingan pemangku kepentingan dan kepatuhan terhadap hukum dalam semua keputusan. Organisasi harus memiliki komitmen baik dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan sistem dan penyusunan struktur organisasi yang dirancang untuk memungkinkannya mengaplikasikan prinsip-prinsip dan praktek tanggung jawab sosial tersebut (Pranoto and Yusuf, 2016).

Keputusan dalam penyusunan program tanggung jawab sosial yang diprioritaskan oleh organisasi harus didasarkan pada prioritas yang ditetapkan berdasarkan hasil pemetaan sosial, kebutuhan dan potensi sumber daya lokal (due diligence), dengan memperhatikan antara lain:

1. Sepanjang terdapat kondisi yang dapat menimbulkan resiko pelanggaran HAM, maka harus dihindari
2. Upaya penyelesaian permasalahan terkait operasional Perusahaan yang mungkin dikeluhkan masyarakat
3. Mengantisipasi peluang terjadinya diskriminasi dan kelompok rentan
4. Upaya untuk menghormati hak-hak sipil, ekonomi, sosial-budaya dan politik serta hak-hak dasar pekerja.

Dalam praktiknya, khususnya terkait dengan ketenagakerjaan, ada aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh manajemen CSR, misalnya. Sebuah sistem hubungan kerja : Kondisi kerja dan jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta lingkungan kerja yang kondusif. Sikap

proaktif terhadap masalah ketenagakerjaan melalui dialog yang menguntungkan menciptakan sinergi bagi pihak-pihak terkait.

Aspek lingkungan yang memerlukan perhatian berkaitan dengan kegiatan: Pencegahan dan pengelolaan pencemaran dampak kegiatan komersial, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati serta pemulihan habitat flora dan fauna setempat. Sementara itu, cara kerja (ketakutan) perusahaan yang adil harus diperhatikan, misalnya. baik itu sebagai praktik antikorupsi, partisipasi yang bertanggung jawab dalam isu-isu pembangunan, persaingan yang sehat/adil dan mempromosikan tanggung jawab sosial dalam rantai pasokan dan penghormatan terhadap hak cipta.

Dalam hal partisipasi dan pengembangan masyarakat, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan program CSR adalah sebagai berikut:

1. Upaya melibatkan masyarakat dalam investasi sosial
2. Aspek yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
3. Penciptaan pekerjaan dan peningkatan keterampilan
4. Perkembangan dan ketersediaan teknologi dan
5. Upaya peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat terutama di wilayah-wilayah yang mungkin terkena dampak operasional Perusahaan.

Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan masalah konsumen yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial:

1. Upaya untuk memasarkan secara adil melalui fakta dan informasi yang tidak memihak serta praktik kontrak yang adil
2. Upaya untuk memastikan kesehatan dan keselamatan konsumen
3. Memelihara hubungan baik untuk menerapkan konsumsi yang berkelanjutan
4. Layanan dan dukungan pelanggan serta penafian lanjutan (disclaimer)
5. Terkait dengan perlindungan dan privasi data konsumen
6. Akses juga ke layanan pusat organisasi
7. Pendidikan dan kepekaan untuk perilaku konsumen yang menguntungkan.

### **Metode Partisipatif Identifikasi Potensi Sumberdaya Masyarakat**

Metode penilaian potensi sumber daya kota dan daerah adalah penilaian pedesaan partisipatif (PRA). PRA adalah seperangkat metode/pendekatan yang diharapkan dapat digunakan untuk memfasilitasi masyarakat untuk:

1. Pertukaran informasi dan pengalaman
2. Untuk menganalisis kondisi kehidupan mereka
3. Membuat rencana aksi berdasarkan hasil analisis.

Tujuan penilaian desa partisipatif adalah:

1. Masyarakat mampu mengetahui secara detail potensi dan permasalahannya sendiri dengan tujuan jangka pendek.
2. Tujuan jangka panjang adalah untuk meningkatkan kesadaran bahwa anggota masyarakat memiliki potensi sekaligus menghadapi masalah.

### **Pemetaan**

(Sumardjo et al., 2014) Peta adalah gambar, miniatur, atau bentuk yang menunjukkan satu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain. Pemetaan adalah kegiatan yang melibatkan pemetaan, yang diawali dengan melakukan survei, wawancara dan observasi, kemudian menyajikannya dalam bentuk gambar atau miniatur yang mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Tujuan dari pemetaan adalah:

1. Pengetahuan tentang distribusi penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan.
2. Pengetahuan tentang distribusi sumber daya alam, infrastruktur desa yang ada.
3. Mengkaji kondisi masyarakat (khususnya masyarakat miskin, perempuan, pemuda dan kelompok marginal lainnya) dalam hal akses dan pengelolaan ruang publik yang ada.
4. Studi tentang keadaan masyarakat (khususnya kaum miskin, perempuan, pemuda dan kaum terpinggirkan lainnya) dalam hal akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dan sosial lainnya.

Pembuatan Peta Sosial atau Peta Situs untuk Mendorong Partisipasi Pembuatan peta atau situs sosial untuk pemberdayaan masyarakat secara partisipatif tentunya membutuhkan keterlibatan ahli lokal dan orang-orang yang menguasai wilayah (tanah) untuk membuat peta tersebut. Ini membuat peta lebih akurat dalam hal tata letak dan

batas. Di zaman sekarang ini, Anda dapat menggunakan GPS untuk membuat peta dengan batas dan lokasi peta, namun Anda tetap perlu melibatkan masyarakat lokal yang sudah menguasai wilayah tersebut. Di daerah terpencil atau di mana tidak ada sinyal, itu tetap diperlukan.

Langkah-langkah:

- Pelatih menjelaskan tujuan kegiatan, alur proses dan waktu yang diperlukan untuk pemetaan sosial ini,

Fasilitator mulai memfasilitasi diskusi dengan kelompok masyarakat untuk menyusun daftar legenda yang akan dimasukkan ke dalam peta. Seperti jalan, gang, gang, dan rumah (beri label sesuai dengan peringkat kesejahteraan yang telah mereka lakukan); landmark penting seperti hutan, bukit, ladang; ruang publik seperti sekolah dan masjid, gereja atau kuil; semua sumber air, baik alami maupun buatan. Jika diskusi tentang air dan sanitasi relevan, uraikan fasilitas sanitasi umum dan jamban (dibeli atau diperoleh dengan cara lain), perumahan laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam pembangunan atau pemeliharaan layanan air dan sanitasi; dan rumah untuk pria atau wanita dari segala jenis pendidikan.

Kelompok laki-laki dan perempuan, bersama-sama atau terpisah menurut rasio gender, menggambar peta lingkungan sekitar. Bergantung pada kondisi setempat dan ketersediaan ruang dan bahan, mereka dapat memilih untuk menggambar di atas lembaran kertas besar (2-4 lembar kertas-kertas yang disatukan dengan alat gambar biasa), di lantai atau di luar.

Legenda dijelaskan dengan menggunakan bahan lokal seperti biji-bijian, biji-bijian, tepung atau kapur saat dipetakan di atas tanah atau simbol lain saat dipetakan di atas kertas. Jika peta dibuat di atas tanah atau di area terbuka, ingatlah untuk menyalinnya di atas kertas setelah kegiatan selesai. Minta kelompok diskusi untuk memberikan bukti kondisi akses sumber daya alam dan ruang/fasilitas publik

- Minta panelis untuk menghitung rumah tangga berdasarkan kesejahteraan mereka.
- Ajak peserta untuk berdiskusi:

- Identifikasi potensi sumber daya desa seperti: Mata air, irigasi, lahan pertanian.
  - Identifikasi fasilitas umum kota (Puskesmas/Pustu/Polindes, sekolah).
- 1) Siapa yang mengeksploitasi sumber daya alam yang tersedia (karena mereka mengeksploitasi orang miskin, perempuan, pemuda dan kelompok terpinggirkan lainnya)?.
  - 2) Siapa yang menggunakan sumber daya publik yang ada (seperti kaum miskin, perempuan, pemuda dan kelompok terpinggirkan lainnya) ketika mereka menggunakan sumber daya publik yang ada?
  - 3) Potensi sumber daya apa yang dilihat dan dapat dikembangkan?
  - 4) Bagaimana peta sosial ini dapat digunakan untuk merencanakan dan mengelola kekayaan desa dan memberi manfaat bagi desa, miskin, kaya, perempuan, pemuda dan kelompok terpinggirkan lainnya

Mintalah dua perwakilan dari satu peserta perempuan dan satu peserta laki-laki untuk menyampaikan apresiasinya terhadap proses dan hasil pemetaan sosial yang mereka buat.

Informasi minimum yang diharapkan:

1. Jumlah, jenis dan lokasi ruang publik yang dibuat oleh kotamadya, serta jumlah, jenis dan lokasi ruang yang dibuat oleh kotamadya itu sendiri dan yang dibuat sehubungan dengan proyek sebelumnya.
2. Batasi area untuk fasilitas yang ada dan perjelas akses rumah tangga ke fasilitas yang ada
3. Menempatkan keluarga kaya, miskin dan menengah berdasarkan kriteria yang telah disepakati dan hubungannya dengan kontrol akses terhadap fasilitas yang ada yaitu Rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas yang ada
4. Rumah anggota masyarakat yang terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas menurut jenis kelamin dan tingkat sosial.

Peta dibuat secara sederhana dengan melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi lokasi lembaga desa, bangunan yang penting bagi masyarakat. Dengan peta ini kita mendapatkan gambaran berapa lama tanah desa digunakan untuk pemukiman, pertanian dan usaha produktif lainnya. Hal ini terlihat pada peta digital

dimana kita tidak bisa mengetahui apa dan dimana bangunan seperti sekolah, tempat ibadah, kantor desa, puskesmas dan lain-lain.

### **Transek**

(Sumardjo et al., 2014) Transek adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui kondisi desa secara partisipatif dengan menelusuri dan mengamati wilayah desa. Tujuan pelaksanaan transek adalah untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi penduduk untuk mendiskusikan peluang dan masalah kota mereka dengan mengamati tempat-tempat di mana peluang dan masalah tersebut terjadi. Keuntungan dari operasi transek adalah:

Meningkatkan dan meningkatkan motivasi dan keterlibatan warga untuk mengurus potensi diri dan permasalahan desa.

Desa memiliki peluang dan masalah berupa data/informasi. Pelacakan lokasi (transek) dilakukan untuk memungkinkan masyarakat mendiskusikan keadaan sumber daya dengan mengamati langsung apa yang sedang dibicarakan di lokasi.

Menurut fokus informasi yang digali, transek terdiri dari: Pertama, transek sumberdaya merupakan tindak lanjut desa untuk melakukan pengamatan/pengamatan tentang peluang/masalah umum di wilayah pemukiman desa, seperti: Permukiman dan jasa perumahan, pemeliharaan kebun, kantor desa, sekolah, puskesmas, tempat ibadah, jalan, MCK, saluran air, fasilitas sosial dan fasilitas umum, terutama dari sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimaksud meliputi:

1. Geografi terdiri atas topografi (bentuk, kemiringan dan kondisi permukaan alam); spesies, kesuburan, penggunaan lahan (sawah, kebun, hutan, padang rumput); air dan daerah resapannya.
  2. Pola tanam termasuk spesies tanaman utama, kegunaan, produktivitas, hasil. c) Rekyasa lokal termasuk sistem pengelolaan air, pengendalian erosi, pagar hidup.
  3. Sumber daya alam berupa pasir dan batu dari sungai/sumur, sumber air bersih.
- Ketiga, transek tematik adalah jalur desa yang dapat digunakan untuk melakukan observasi/pengamatan pada subjek/topik tertentu, misalnya hama tikus, jangkrik daun, kesehatan anak, pendidikan dasar, dll

Persiapan melakukan kegiatan lintas sektor minat khusus adalah menyiapkan kelompok dan komunitas yang akan berpartisipasi, termasuk menentukan kapan dan di mana mereka akan bertemu. Kami juga memproduksi alat tulis, kertas lebar (palan), karton berwarna, kertas berwarna, lem, spidol berwarna.

### **Kalender Musim**

(Sumardjo et al., 2014) Kalender musim adalah alat untuk mengidentifikasi periode kritis dalam kehidupan masyarakat, yaitu. H. ketika masalah pemenuhan kebutuhan dasar dirasa cukup sentral dan berulang. Dengan teknik PRA, alat penilaian tidak selalu mampu mengidentifikasi semua jenis informasi yang diperlukan. Setiap alat penilaian yang digunakan dalam setiap kegiatan (pekerjaan) memiliki karakteristiknya masing-masing. Alat studi kalender musim dapat digunakan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang kebutuhan dasar masyarakat.

Tujuan dibuatnya kalender musiman adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi dan pola kegiatan masyarakat sehingga diperoleh profil kegiatan pokok masyarakat sepanjang tahun.
2. Untuk mengetahui profil aktivitas masyarakat, sehingga dapat diketahui pola penggunaan waktu masyarakat, yaitu. H. saat gereja sibuk dan saat gereja memiliki waktu luang sepanjang tahun.
3. Pengetahuan tentang partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung masyarakat dalam melaksanakan kegiatan musiman.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

CSR adalah tanggung jawab organisasi atas dampak keputusan dan tindakannya terhadap masyarakat dan lingkungan, yang memanifestasikan dirinya sebagai perilaku transparan dan etis sejalan dengan keberlanjutan dan masyarakat. Kesejahteraan, dengan memperhatikan harapan pemangku kepentingan, sesuai dengan hukum yang ditetapkan dan standar perilaku internasional dan terintegrasi di seluruh organisasi.

CSR merupakan konsep yang menuntut perusahaan untuk memperhatikan tidak hanya keadaan hasil perusahaan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat sekitar. Konsep CSR didasarkan pada triple balance of profit, people and planet. (Nabilla and Hamid, 2021)

(Rosyida and Tonny Nasdian, 2011) pemberdayaan adalah cara atau sarana partisipasi. Pemberdayaan masyarakat tentunya diperlukan sebelum tahap ini tercapai. Pemberdayaan memiliki dua unsur utama, otonomi dan partisipasi.

(Rosyida and Tonny Nasdian, 2011) mendefinisikan partisipasi sebagai proses aktif yang diprakarsai oleh anggota masyarakat itu sendiri, dipandu oleh cara berpikir mereka sendiri, menggunakan sumber daya dan proses (lembaga dan mekanisme) di mana mereka dapat secara efektif menegaskan kontrol.

Semoga artikel ini dapat dijadikan acuan dan acuan bagi penulis lainnya. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kesalahan dalam penulisan artikel ini, oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan kontribusi yang bersifat membangun dari para pembaca, yang sangat diperlukan bagi penulis selanjutnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Nabilla, A. and Hamid, A. (2021) 'Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa', *Journal of Social Work and Social Services*, 2(2), pp. 103–111.
- Pranoto, A.R. and Yusuf, D. (2016) 'Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarijaya', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(1), pp. 39–50. Available at: <https://doi.org/10.22146/JSP.13094>.
- Rosyida, I. and Tonny Nasdian, F. (2011) 'Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan', *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1), pp. 51–70. Available at: <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i1.5832>.

Sumardjo et al. (2014) IMPLEMENTASI CSR MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT: Inovasi Pemberdayaan Masyarakat, Care.Ipb.Ac.Id. Available at: <http://care.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2019/11/E-book-inovasi-pemberdayaan-masyarakat.pdf>.